

PENGARUH PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nurina*¹, M. Rizal Yahya*²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Syiah Kuala
e-mail: inaputra12@gmail.com*¹, mrizalyahya@yahoo.com*²

Abstract

The research examines the effect of implementation of capital expenditure and adherence to laws and regulations on accountability performance of city agencies Banda Aceh. The research objective was to determine the effect of the implementation of the capital expenditure budget and compliance with laws and regulations to the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh partial or collectively. The of this study was population treasurer of 30 working units in the city of Banda Aceh, which have 90 treasurer. Primary data were collected by distributing questionnaires. Data analysis used is multiple linear regression model. The results of the study can be explained that the implementation of the capital expenditure has positive influence on performance accountability of government agencies in Banda Aceh. Obedience to the laws and regulations has positive effect on performance accountability of government agencies in Banda Aceh. The correlation between the variable capital expenditure budget implementation and compliance with laws and regulations with the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh is positive and relatively strong. The role of variable capital expenditure budget implementation and compliance with laws and regulations with the accountability of the performance of city agencies Banda Aceh is still more dominant than the other variables.

Keywords — *The implementation of the capital budget, adherence to the rule of law, accountability of the performance of government agencies*

1. Pendahuluan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mulai di terapkan pada masa reformasi menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja instansi pemerintah. Sistem ini tidak hanya menjadi arah pencapaian program kerja instansi namun juga sebuah komitmen pemerintah dalam memenuhi kewajibannya serta mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dan visi organisasi. Sistem ini mulai dimplementasinya sejak penyusunan Renstra sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat manajemen (kinerja) dalam rangka penyelenggaraan pemerintah terdesentralisasi yang diharapkan mampu memperbaiki kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah menunjukkan seberapa jauh pemerintah melaksanakan fungsinya sebagaimana yang dijanjikan kepada publik (Muhammad, 2008:9). Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik

karena belum menampakkan hasil yang baik yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat menuntut pemerintahan mempunyai kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai perwujudan konsep otonomi daerah (Auditya dan Husaini, 2013). Kondisi ini hampir terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Provinsi Aceh khususnya di Kota Banda Aceh.

Salah satu aspek yang relevan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Banda Aceh adalah pelaksanaan anggaran daerah. Anggaran daerah memainkan peranan yang penting dalam mendukung siklus perencanaan strategi daerah. Pelaksanaan anggaran daerah menjadi desain teknis atau cetak biru dari strategi untuk mencapai visi instansi dengan cara-cara yang benar dan anggaran akan menghasilkan ukuran-ukuran kinerja yang akan dicapai. Jika kualitas pelaksanaan anggaran Daerah rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah juga akan relative lemah. Jika ini terjadi maka kinerja pemerintah daerah sangat sulit tercapai (Mardiasmo, 2006:176).

Penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah sering tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, dan miskin kreativitas (Endrayani et.al, 2014). Perilaku para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang kemudian berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik (Bahri, 2012)

Ketaatan pejabat pada peraturan perundangan juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara maksimal di Kota Banda Aceh. Sebagai entitas akuntansi Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh wajib menyelenggarakan akuntansi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia juga didukung oleh hadirnya sejumlah aturan hukum dan perangkat peraturan pemerintah yang ikut mengaturnya. Semua aturan hukum tersebut menjadi komponen wajib yang harus ditaati sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dan kecurangan yang kemudian menimbulkan hambatan dalam pencapaian akuntabilitas kinerja instansi. Ketaatan pada aturan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Zirman dan Muhammad, 2010).

Aturan sebagai nilai yang telah diyakini bersama oleh pejabat pada Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh akan dapat mengarahkan, mengontrol dan mengatur perilaku pejabat dari pengaruh buruk. Dalam kerangka sistem akuntansi pemerintahan, aturan akan menjadi kaidah bagi sebuah pertimbangan yang menyebabkan seseorang pejabat akan berorientasi pada sasaran anggaran yang telah ditetapkan yang tentunya mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita hukum. Namun masalahnya ketika dihadapkan pada berbagai kepentingan, kebutuhan dan keinginan material yang harus dipenuhinya menyebabkan pejabat harus melakukan penyimpangan secara sengaja, melakukan perbuatan salah dan tindakan yang tidak patuh. Kondisi ini kemudian berdampak terhadap rendahnya akuntabilitas kinerja.

Teori tersebut membenarkan adanya pengaruh positif antara pelaksanaan anggaran belanja modal, ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran belanja modal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Banda Aceh, untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan terhadap akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kota Banda Aceh.

2. Kerangka Teoritis Dan Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Adisasmita (2011:89) menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut Bastian (2010:385) pada sektor publik istilah akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan dari pimpinan atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat. Lebih khusus pada instansi pemerintah akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat umum.

Akuntabilitas menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012:2) adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kemudian Gharthey (dalam modul Pusdiklatwas BPKP, 2007) juga menyatakan bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan stewardship yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan.

Menurut Peraturan Pemerintah No.8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Sementara Bastian (2010:274) menyatakan bahwa kinerja organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi.

Kinerja menurut Rue dan Byars dalam Nasucha (2009:24) adalah tingkat pencapaian. Kinerja bagi setiap instansi merupakan tingkat pencapaian hasil atau nilai ukur keberhasilan organisasi dalam waktu tertentu. Kemudian Rumler dan Brache dalam Nasucha (2009:24) membagi kinerja pada tiga meter. Pertama strategi tujuan yang akan dilaksanakan. Kedua proses yaitu bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan secara efisien dan efektif. Ketiga hasil dan pertanggungjawaban pekerjaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja instansi merupakan prestasi yang dapat dicapai dalam periode tertentu baik yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan/program kerja instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi pemerintah. Kinerja instansi pemerintah merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya pencapaian atas tujuan anggaran yang telah ditetapkan.

Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya jika telah terbukti bahwa indikator atau ukuran capaian sasaran kinerja sesuai atau searah dengan misi yang telah dirumuskan. Indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dampak (*impact*) serta proses (*process*) (Adisasmita, 2011:90).

2.2 Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Secara teoritis, ketaatan akuntansi juga merupakan kewajiban. Sebab, jika laporan keuangan dibuat tanpa mengikuti aturan akuntansi yang berlaku, keadaan tersebut dinyatakan sebagai suatu bentuk kegagalan dan akan menimbulkan kecenderungan kecurangan atau perilaku tidak etis yang tidak dapat atau sulit ditelusuri auditor (Thoyibatun, 2009). Ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian prosedur pengelolaan aset organisasi, pelaksanaan prosedur akuntansi, dan penyajian laporan keuangan beserta bukti pendukungnya dengan aturan yang ditentukan BPK dan atau SAP (PP RI Nomor 24/2005). Dinyatakan mentaati aturan akuntansi jika PTN telah menerapkan persyaratan pengungkapan, menyajikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan publik, objektif, memenuhi syarat kehati-hatian dan memenuhi konsep konsistensi penyajian (Thoyibatun, 2009).

Dengan demikian ketaatan mengandung arti kemauan sikap dalam mengikuti berbagai prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh suatu otoritas dalam hal ini pemerintah. Dengan adanya

kemauan sikap dalam mentaati berbagai aturan dan prosedur maka akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan kecurangan tidak akan terjadi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh yang berlokasi di Kota Banda Aceh. Objek penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran belanja modal, ketaatan pada peraturan perundangan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara subjek penelitian adalah pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bendaharawan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh yang berjumlah sebanyak 90 Bendaharawan atau masing-masing SKPD mewakili 3 (tiga) bendaharawan. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel. Penarikan sampel ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2006:134) yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari pelaksanaan anggaran belanja modal, pelaksanaan sistem akuntansi keuangan dan kinerja. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Sekaran, 2011:75). Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2009:127). Kuesioner berfungsi mengumpulkan data primer secara langsung dari sumber pertama. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan. Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner ke bentuk data kuantitatif maka digunakan skal ukur yaitu skala Likert.

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu masing-masing satu variabel terikat (*dependen*) dan dua variabel bebas (*independen*). Variabel *dependen* adalah akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (*Y*). Sementara variabel *independen* yaitu pelaksanaan anggaran belanja modal (X_1) dan ketaatan pada peraturan perundangan (X_2). Kedua variabel bebas tersebut akan mempengaruhi variabel terikat (*Y*).

Untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan anggaran belanja modal dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah di Kota Banda Aceh digunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y	= Akuntabilitas kinerja pemerintah
X ₁	= Pelaksanaan anggaran belanja modal
X ₂	= Ketaatan pada peraturan
β ₁ ...β ₂	= Parameter /koefisien regresi
α	= Intercep/Konstanta
ε	= Error

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang telah disusun dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak di ukur secara nyata. Validitas instrument tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan kuesioner untuk mengukur objek-objek yang diteliti (Sudarmanto, 2011:78). Objek yang di teliti dalam penelitian ini adalah pelaksanaan belanja modal, ketaatan pada peraturan perundangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Realibilitas instrument menggambarkan kepercayaan kepada kemantapan alat ukur yang digunakan yaitu angket. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil dan konsisten sehingga alat ukur tersebut akan dapat memberikan hasil pengukuran yang serupa dan tidak berubah-ubah (Sudarmanto, 2011:89).

4. Hasil Dan Pembahasan

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan APBK pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh. Aparatur pemerintah daerah tersebut terpilih secara terpisah dari 30 SKPD di Kota Banda Aceh yang terdiri dari bendaharawan dan Kepala Subagian Keuangan.

Aparatur pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh sebahagian besar atau 55,6% berumur antara 41-45 tahun. Ada 7,8% dari jumlah aparatur pemerintah dengan umur lebih dari 50 tahun dan 17,8% dari jumlah aparatur pemerintah dengan umur antara 36-40 tahun. Selebihnya 18,9% dari

jumlah aparatur pemerintah dengan umur antara 46-50 tahun. Aparatur pemerintah daerah yang terdata pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh sebahagian besar atau 70,0% berjenis kelamin laki-laki, dan selebihnya 30,0% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 74,4% dari jumlah aparatur pemerintah daerah yang terdata pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh adalah mereka dengan tingkat pendidikan S1. Ada 12,2% dari jumlah aparatur pemerintah daerah dengan pendidikan S2. Selebihnya 13,3% dari jumlah aparatur pemerintah dengan tingkat pendidikan SLTA. Mereka sebahagian besar atau 75,6% dengan golongan kepangkatan IIIc-IIIId. Selebihnya 24,4% dari jumlah aparatur pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh dengan golongan kepangkatan IIIa-IIIb.

Penggunaan data kuesiner dalam penelitian ini mensyaratkan suatu pengujian validitas dengan cara mengkorelasikan skor item tiap indikator pertanyaan dengan nilai skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat daya pembeda item (*item discriminability*). Daya pembeda dilakukan dengan cara "korelasi item-total" yaitu konsistensi antara skor item dengan skor secara keseluruhan. Pengukuran ini dilakukan dengan bantuan perangkat program *Statistic SPSS* yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coeffisient of Corelation*. Kemudian nilai korelasi hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar 90 sampel yaitu sebesar 0,195.

Penggunaan kuesioner untuk mendapatkan data mentah yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini juga mensyaratkan adanya suatu sifat konsistensi melalui uji kehandalan/reliabilitas, sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan terhadap item pertanyaan dari kuesioner menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Malhotra, 2005:305). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,600 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban

setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur pemerintah daerah yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Berdasarkan enam indikator yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, hasil dari program kerja instansi yang dibiayai dengan anggaran mendekati sasaran yang ditetapkan (target) menjadi indikator terbaik dengan nilai jawaban 3,989. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju).

Program kegiatan instansi yang dibiayai dengan anggaran dapat berdampak terhadap kemakmuran masyarakat menjadi indikator yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,256. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator dan mendekati nilai 3 (skor untuk jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah responden yang terdata menjawab kurang setuju untuk indikator pertanyaan tersebut.

Pelaksanaan anggaran belanja modal pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,639 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur pemerintah yang terdata menjawab setuju untuk pertanyaan tentang pelaksanaan anggaran belanja modal tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Berdasarkan delapan indikator yang digunakan untuk menilai pelaksanaan anggaran belanja modal, pelaksanaan belanja modal didukung oleh prosedur administrasi yang jelas menjadi indikator terbaik dari pelaksanaan anggaran belanja modal pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai jawaban 4,056. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju).

Sementara pelaksanaan belanja modal tidak menimbulkan pemborosan anggaran daerah menjadi indikator yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,311. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur pemerintah yang terdata menjawab kurang setuju untuk indikator pertanyaan tersebut. Walaupun ada dari mereka yang

memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Ketaatan aparatur pemerintah terhadap peraturan perundangan pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,648 skor. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur pemerintah yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang ketaatan pada peraturan perundangan tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Berdasarkan tiga indikator yang digunakan untuk menilai ketaatan aparatur pemerintah pada peraturan perundangan, instansi tidak mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah yang berada di atasnya menjadi indikator terbaik dari ketaatan aparatur pemerintah pada peraturan perundangan dengan nilai jawaban 3,967. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk jawaban setuju).

Sementara penggunaan anggaran publik oleh pejabat yang belum bebas dari kecurangan menjadi indikator yang masih kurang baik dengan nilai jawaban 3,422. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur pemerintah yang terdata menjawab kurang setuju untuk indikator pertanyaan tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh terjadi perubahan setiap saat akibat berubahnya berbagai faktor termasuk didalamnya pelaksanaan anggaran belanja modal, ketaatan aparatur pemerintah pada peraturan perundangan serta variabel lainnya yang tidak terlibat dalam model analisis ini. Dengan format tersebut maka variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) dalam model ini disebut sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh banyak variabel bebas khususnya variabel pelaksanaan anggaran belanja modal (X_1) dan ketaatan pada peraturan perundangan (X_2).

Pengaruh variabel bebas dan terikat dalam model analisis ini dapat dibuktikan melalui formula regresi berganda (*multiple regression*). Formulasi ini bertujuan untuk memprediksi sejauhmana tingkat kenaikan skala likert dari 2 (dua) variabel bebas

terhadap kenaikan skala variabel terikat pada tingkat kesalahan tertentu (signifikansi) atau dimana pengaruh antar variabel tersebut benar-benar nyata (signifikan).

Pengujian pengaruh pelaksanaan anggaran belanja modal (X_1) dan ketaatan pada peraturan perundangan (X_2) secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh di dasarkan pada nilai koefisien regresi β_1 dan β_2 . Berdasarkan regresi linier berganda diperoleh koefisien $\beta_1 = 0,430$ dan $\beta_2 = 0,460$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga hipotesis alternatif H_a di terima dan hipotesis nol (H_0) di tolak. Artinya pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pengujian pengaruh Pelaksanaan anggaran belanja modal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh didasarkan pada nilai koefisien regresi β . Berdasarkan regresi linier berganda diperoleh $\beta_1 = 0,430$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 \neq 0$, sehingga hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) di tolak. Artinya bahwa pelaksanaan anggaran belanja modal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh. Kemudian pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh diperoleh nilai koefisien regresi $\beta_2 = 0,460$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_2 \neq 0$, sehingga hipotesis alternatif (H_a) di terima dan hipotesis nol (H_0) di tolak. Artinya bahwa ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh.

5. Kesimpulan, Keterbatasan Dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan adalah:

1. Pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Pelaksanaan anggaran belanja modal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,430. Namun pengaruh variabel ini sedikit lebih rendah di

banding variabel ketaatan aparatur pada peraturan perundangan.

3. Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh dengan nilai koefisien regresi 0,460. Pengaruh variabel ini lebih kuat di banding variabel ketaatan aparatur pada peraturan perundangan.
4. Nilai korelasi $R = 77,3\%$ menjelaskan terdapat hubungan positif dan relatif kuat antara variabel pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh
5. Nilai korelasi determinasi $R^2 = 59,7\%$ menjelaskan peran variabel pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada kantor Pemerintah Kota Banda Aceh relative lebih kuat dibanding variabel lainnya di luar model yang berperan hanya 40,3%.

Penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Kurangnya literatur yang mendukung teori tentang ketaatan pada peraturan perundangan, sehingga penggunaan indikator masih belum efektif.
2. Indikator pelaksanaan anggaran belanja modal masih menggunakan prinsip pengelolaan keuangan secara umum sehingga kurang dapat mewakili dalam pengukuran aktivitas pelaksanaan anggaran belanja modal.

Mengingat masih adanya beberapa indikator yang harus ditingkatkan kinerjanya, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja kegiatan Pemerintah Kota Banda Aceh harus memiliki komitmen terhadap kepentingan umum dan kemakmuran masyarakat
2. Pelaksanaan anggaran belanja modal perlu diawasi secara efektif agar tidak menimbulkan pemborosan uang daerah dan perlu dilaksanakan secara lebih transparan.
3. Pemerintah harus member sanksi tegas terhadap aparatur yang tidak mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Syukriy, dan Abdul Halim. 2008. Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan, <http://swamandiri.wordpress.com/2008/02/29>
- Adisasmita Rahardjo (2011) Manajemen Keuangan Daerah, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arikunto (2009) Prosedur Penelitian. Jakarta: Reneka Cipta.
- Auditya Lucy dan Husaini Lismawati (2013) Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Journal Fairness Volume 3, Nomor 1, Program Magister Akuntansi Universitas Bengkulu
- Bahri, Syambudi Prasetya (2012) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon) Universitas Pasundan. Bandung
- Bastian, Indra (2010) Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Badruzaman, Jajang dan Chairunnisa, Irna (2011) Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan Good Governance. Jurnal Akuntansi dan Bisnis AUDI.
- Badroen, Faisal (2008) Etika Bisnis Dalam Islam, Kencana, Jakarta.
- Badan Pengawasan Daerah (2012) Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal
- Darise Nurlan (2008) Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Indeks
- Erlina, Rasdianto (2013) Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, Penerbit. Brama Ardian. Medan
- Endrayani Komang Sri et.al (2014) Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja), e-Journal Akuntansi Vol 2 No. 1 Universitas Pendidikan Ganesha
- Halim, Abdul (2009) Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamzah Andi (2010) Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamatenggo dan Hamid Habbe (2009) Faktor-Faktor Kompetensi Aparatur Inspektorat Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo, Journal Magister Keuangan Daerah, Universitas Hasanuddin .
- Nasucha Chaizi (2009) Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktik, Jakarta: Grasindo
- Nordiawan Deddi (2012) Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nusantoro Sunarno Agus dan Heru Subiyantoro (2009) Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kabupaten Tasikmalaya, STIA LAN Jakarta.
- Mahmudi (2013) Manajemen Kinerja Sector Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo (2006) Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.
- _____(2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
- Rosady, Ruslan (2009) Etika Kehumasan Konsep dan Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rasdianto Erlina (2013) Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Medan: Brama Ardian
- Rasuli Susi Heptariani Z, M. dan Taufeni Taufik (2014) Pengaruh Kejelasan Sasaran, Budaya Organisasi, dan Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Jurnal Sorot Vol 8 No 1 Lembaga Penelitian Universitas Riau
- Rahmawati, Ardiana Peri. 2012. "Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Moralitas Manajemen Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi" (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro
- Rosidi Abidarin dan Rinatania Anggraeni Fajriani (2013) Reinventing Government: Demokrasidan Reformasi Pelayanan Publik, Journal
- Riantiaro dan Nur (2011) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu) Jurnal Ekonomi dan bisnis, Vol.3, No.3 Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru

- Septiriane Sherillia dan Yon Nusdal (2012) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Survey Pada DPRD Kota Bandung) Jurnal Riset Akuntansi–Volume IV No.1 Universitas Komputer Indonesia
- Sudarsono (2010) Kamus Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sekaran, Uma (2011) Metode Penelitian Untuk Bisnis, Salemba Empat, Jakarta
- Sulaeman (2013) Evaluasi Sistem Pengukuran Kinerja di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi”. Yogyakarta: Program Magister Akuntansi FEB UGM. Tesis Tidak Dipublikasikan.
- Sudarmanto Gunawan (2011). Analisis Regresi Ganda dengan SPSS. Graha Ilmu Yogyakarta
- Thoyibatun, Siti (2012) Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perilaku Tidak Etis dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi serta Akibatnya Terhadap Kinerja Organisasi. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol: 16, No. 2.
- Zirman dan Muhammad (2010) Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Motivasi Kerja, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ekonomi, Vol 18, No 01, Diponogoro Semarang.

Lampiran 1

Tabel 1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	SAMPEL
1	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	3
2	Dinas Syariat Islam	3
3	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	3
4	Dinas Kesehatan	3
5	Dinas Pekerjaan Umum	3
6	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika	3
7	Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja	3
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3
9	Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM	3
10	Dinas Kelautan, Perikanan Dan Pertanian	3
11	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	3
12	Dinas Kebersihan Dan Keindahan Kota	3
	BADAN	
1	Badan Kesbangpolinmas Dan PB	3
2	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3
3	Inspektorat	3
4	Bappeda	3
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	3
6	Badan Penanggulangan Bencana Kota	3
7	Sekretariat DPRK Kota Banda Aceh	3
8	RSU Meuraxa	3
9	KIP	3
	Sekretariat/Kantor	
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	3
2	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3
3	Sekretariat Baitul Mal	3
4	Sekretariat Majelis Adat Aceh	3
5	Kantor Pelayanan Terpadu Satu Atap	3
6	Kantor Pemberdayaan Perempuan & KB	3
7	Kantor Perpustakaan Dan Arsip	3
8	Kantor Lingkungan Hidup	3
9	Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH	3
	Jumlah	90

Sumber: www.bandaacehkota.go.id

Tabel 2
Kategori Skala Likert

Sangat tidak Setuju	Tidak setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat setuju
1	2	3	4	5

Tabel 3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Ukuran	Item Pertanyaan
Dependen						
1	Pelaksanaan anggaran belanja modal (X ₁)	Pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.	Tertib	Likert	1-5	B1
			Taat pada peraturan			B2
			Efisien			B3
			Ekonomis			B4
			Efektif			B5
			Transparan			B6
			Bertanggung jawab			B7
			Manfaat untuk masyarakat			B8
2	Ketaatan pada peraturan perundangan (X ₂)	patuh atau tidak curang, taat azas serta tidak berubah dari ketentuan yang sudah ditetapkan (Sudarsono, 2010:464)	Tepat waktu menyampaikan laporan	Likert	1-5	C1
			Tidak melakukan kecurangan			C2
			Tidak pernah mendapatkan sanksi			C3
3	Akuntabilitas kinerja pemerintah (Y)	Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (<i>strategic planning</i>) suatu organisasi (Bastian 2010 : 274)	Masukan	Likert	1-5	D1
			Proses			D2
			Keluaran			D3
			Manfaat			D4
			Hasil			D5
			Dampak			D6

Tabel 4
Karakteristik Responden

	Karakteristik	Frekuensi (n)	Persentase (%)	
1	Umur	36-40 Tahun	16	17,8
		41-45 Tahun	50	55,6
		46-50 Tahun	17	18,9
		>50 Tahun	7	7,8
		Total	90	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	63	70,0
		Perempuan	27	30,0
		Total	90	100,0
3	Pendidikan	SMA	12	13,3

		S1	67	74,4
		S2	11	12,2
		Total	90	100,0
4	Masa Kerja	IIIa-IIIb	22	24,4
		IIIc-IIId	68	75,6
		Total	90	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2016

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 90	Keterangan
B1	Pelaksanaan anggaran belanja modal	0.581	0,195	Valid
B2		0.741		
B3		0.693		
B4		0.779		
B5		0.835		
B6		0.834		
B7		0.763		
B8		0.762		
C1	Ketaatan pada peraturan perundangan	0.824	0,195	Valid
C2		0.813		
C3		0.812		
D1	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	0.694	0,195	Valid
D2		0.835		
D3		0.766		
D4		0.728		
D5		0.820		
D6		0.816		

Sumber :Data Primer (diolah), 2016

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Pelaksanaan anggaran belanja modal (X_1)	B1 s/d B8	0.884	Handal
2	Ketaatan pada peraturan perundangan (X_2)	C1 s/d C3	0.731	Handal
3	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)	D1 s/d D6	0.866	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel 7
Gambaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Pada Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Indikator	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Program kegiatan yang dianggarkan untuk tahun anggaran dapat dipenuhi dengan sumber pendapatan dan sumber daya organisasi yang optimal.	0	0,0	3	3.3	23	25.6	50	55.6	14	15.6	3,833
2.	Realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> ,	0	0,0	11	12.2	22	24.4	48	53.3	9	10.0	3,611
3.	Program kegiatan instansi yang dibiayai oleh anggaran dapat meningkatkan pembangunan daerah.	0	0,0	4	4.4	39	43.3	42	46.7	5	5.6	3,533
4.	Program kegiatan instansi yang dibiayai dengan anggaran dapat bermanfaat bagi kepentingan umum.	0	0,0	4	4.4	49	54.4	36	40.0	1	1.1	3,378
5	Hasil dari program kerja instansi yang dibiayai dengan anggaran mendekati sasaran yang ditetapkan (target).	0	0,0	0	0.0	22	24.4	47	52.2	21	23.3	3,989
6	Program kegiatan instansi yang dibiayai dengan anggaran dapat berdampak terhadap kemakmuran masyarakat	0	0.0	9	10.0	49	54.4	32	35.6	0	0.0	3,256
	Rerata											3,600

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel 8
Gambaran Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal
Pada Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Indikator	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pelaksanaan belanja modal di dukung oleh prosedur administrasi yang jelas.	0	0,0	2	2.2	17	18.9	45	50.0	26	28.9	4.056
2.	Pelaksanaan belanja modal telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	0	0,0	3	3.3	33	36.7	31	34.4	23	25.6	3.822
3.	Pelaksanaan belanja modal tidak menimbulkan pemborosan anggaran daerah.	0	0,0	15	16.7	33	36.7	41	45.6	1	1.1	3.311
4.	Pelaksanaan belanja modal dapat dipenuhi secara berkualitas dengan harga yang rasional.	0	0,0	7	7.8	29	32.2	51	56.7	3	3.3	3.556
5.	Pelaksanaan belanja modal dapat direncanakandan dipenuhi sesuai kebutuhan.	0	0,0	7	7.8	25	27.8	47	52.2	11	12.2	3.689
6.	Pelaksanaan belanja modal dilakukan secara terbuka dan diinformasikan kepada pubik	0	0,0	12	13.3	29	32.2	48	53.3	1	1.1	3.422

7.	Pelaksanaan belanja modal selalu dapat dipertanggung jawabkan	0	0,0	16	17.8	12	13.3	43	47.8	19	21.1	3.722
8	Pelaksanaan belanja modal selalu diarahkan untuk memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.	0	0,0	9	10.0	24	26.7	57	63.3	0	0.0	3.533
	Rerata											3.639

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel 9
Gambaran Ketaatan Pejabat Pada Peraturan Perundangan Pada Kantor Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Indikator	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Pejabat selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.	0	0,0	9	10.0	23	25.6	57	63.3	1	1.1	3,556
2.	Penggunaan anggaran publik oleh Pejabat bebas dari kecurangan.	0	0,0	0	0.0	52	57.8	38	42.2	0	0.0	3,422
3.	Instansi tidak mendapatkan sanksi administrasi dari pemerintah yang berada di atasnya	0	0,0	5	5.6	10	11.1	58	64.4	17	18.9	3,967
	Rerata											3,648

Sumber : Data Primer (diolah), 2016

Tabel 10
Hasil Analisis Model Regresi Pengaruh Pelaksanaan anggaran belanja modal dan Ketaatan Pada Peraturan perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,356	0,290		1,229	0,223
	Pelaksanaan anggaran belanja modal	0,430	0,069	0,468	6,197	0,000
	Ketaatan pada peraturan perundangan	0,460	0,078	0,446	5,904	0,000

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

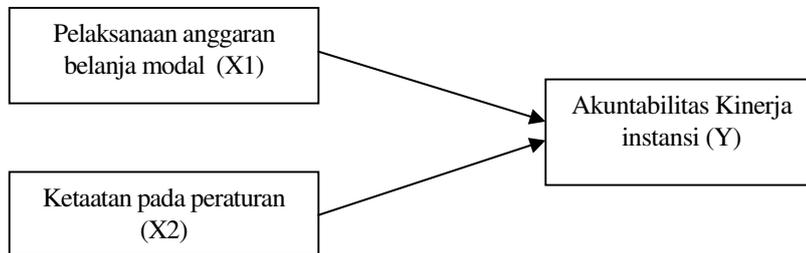
Tabel 11
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,773	0,597	0,588

Sumber: Data Primer (diolah), 2016

Lampiran 2

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Skema Kerangka Penelitian

Hipotesis Penelitian

- H1: Pelaksanaan anggaran belanja modal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh.
- H2: Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh.
- H3: Pelaksanaan anggaran belanja modal dan ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Banda Aceh.